

ANALISIS KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN “LABORATORIUM KEMISKINAN” KABUPATEN PEKALONGAN

Kurniani Wismaningsih¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
e-mail: niawismaningsih@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternatif kebijakan terhadap pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan “Laboratorium Kemiskinan” di Kabupaten Pekalongan. Laboratorium Kemiskinan adalah kebijakan dalam rangka pengentasan kemiskinan yang memiliki ruang lingkup wilayah kabupaten. Kebaruan (*novelty*) program ini adalah pelibatan semua pihak (*Pentahelix*). Laboratorium kemiskinan juga dilakukan dengan pendekatan topografi wilayah yang di setiap wilayah topografi tersebut memiliki karakteristik, sebab dan solusi kemiskinan yang berbeda. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam implementasinya, Laboratorium Kemiskinan mengalami beberapa permasalahan, yaitu: 1. Perangkat Daerah terkait belum berperan secara maksimal; 2. Pemerintah Desa Model kurang aktif dan responsif. Alternatif untuk mengatasi permasalahan, yaitu: 1. Membuat Regulasi tentang Pembentukan Tim Pelaksana Laboratorium Kemiskinan; 2. Meningkatkan Koordinasi antar Perangkat Daerah Pelaksana Laboratorium Kemiskinan dan Desa Model; 3. Menyusun Petunjuk Teknis Kebijakan Laboratorium Kemiskinan. Di antara ketiga alternatif tersebut, alternatif yang direkomendasikan adalah menyusun Petunjuk Teknis Laboratorium Kemiskinan.

Kata Kunci: Pengentasan Kemiskinan, Laboratorium Kemiskinan, Juknis, kebijakan

ABSTRACT

This study aims to provide policy alternatives for the implementation of poverty alleviation policies "Laboratorium Kemiskinan" in Pekalongan Regency. The Laboratorium Kemiskinan is a new policy in the context of poverty alleviation which has district scope. The novelty of this program is the involvement of all parties (Pentahelix). Laboratorium Kemiskinan are also carried out with a regional topographic approach, which in each topographic region has different characteristics, causes and solutions to poverty. The research method used a descriptive qualitative approach and was implemented in Pekalongan Regency. Collecting data using observation, interviews, and documentation. In its implementation, the Laboratorium Kemiskinan has experienced several problems, namely: 1. The relevant regional apparatus has not played an optimal role; 2. Model Village Government that is less active and responsive. Alternatives to solve the problem, namely: 1. Making regulations on the establishment of a Laboratorium Kemiskinan Implementation Team; 2. Increasing the coordination among regional apparatus for implementing the Laboratorium Kemiskinan Village Models; 3. Develop Technical Guidelines for Laboratorium Kemiskinan Policy. Among the three alternatives, the recommended alternative is to compile the Laboratorium Kemiskinan Technical Guidelines.

Keywords: Poverty Alleviation, Poverty Laboratory, Technical Guidance, policy

A. PENDAHULUAN

Permasalahan utama pada negara berkembang, termasuk Indonesia adalah kemiskinan (*poverty*). Indonesia adalah negara yang mempunyai jumlah penduduk miskin relatif banyak yang perlu diantarkan serta dicarikan solusi terbaik.

Ketimpangan ekonomi menjadi isu strategis dalam penyelenggaraan sebuah negara. Hal ini disebabkan ketimpangan ekonomi ini terjadi dalam kehidupan masyarakat dan sering dimaknai memiliki hubungan yang dekat dengan kemiskinan. Itulah mengapa kemiskinan dianggap menjadi persoalan klasik dan kompleks sejak manusia ada dan sepertinya akan terus menjadi permasalahan utama di belahan dunia.

Hasil penelitian terdahulu (Marcus J. Pattinama, 2009) yang melakukan penelitian untuk mendeteksi siapakah penduduk miskin itu? Kemudian mencari alternatif kebijakan yang sesuai dengan kondisi spesifik lokal untuk menanggulangi kemiskinan, dan akhirnya menggali serta memahami kearifan penduduk lokal dalam hubungannya dengan upaya preventif untuk menanggulangi kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kemiskinan bersifat banyak sisi (multifaset). Orang Bupolo dan petani Surade sama-sama mengolah lahan sempit.

Petani Surade miskin karena tidak mempunyai lahan atau memiliki lahan tetapi dengan skala usaha yang relatif kecil. Orang Bupolo memiliki tanah yang relatif luas tetapi mempunyai keterbatasan akses pada teknologi, hidup terisolasi karena tidak mempunyai akses terhadap sarana dan prasarana sosial ekonomi maupun komunikasi, sehingga mereka hidup miskin dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Jadi definisi kemiskinan perlu diperluas meliputi akses terhadap infrastruktur sosial ekonomi, keluar dari keterisolasian, ketidakberdayaan, dan kebebasan mengeluarkan pendapat, serta memperoleh keadilan dalam pembangunan. Kemiskinan tidak bisa didefinisikan secara tunggal yakni dari kaca mata pemenuhan kebutuhan kalori semata.

Data dari Badan Pusat Statistik bahwa, pada bulan Maret 2020 persentase penduduk miskin di Indonesia 9,78%, meningkat 0,56% poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37% poin terhadap Maret 2019. Penduduk miskin pada Maret 2020 sebanyak 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap bulan September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap bulan Maret 2019.

Penurunan terjadi pada periode September 2018-September 2019. Jumlah

penduduk miskin di Jawa Tengah berkurang dari 188.020 jiwa dari 3,867 juta menjadi 3,679 juta jiwa.

Hasil evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan selama ini masih bersifat sentralistik, *business as usual*, eksklusif dan kurang inovatif serta tidak berbasis data dan permasalahan yang jelas. Oleh karena itu dibutuhkan terobosan jitu untuk masalah tersebut.

Kushandajani (2015) melakukan penelitian menyangkut bagaimana pemerintah daerah Kota Pekalongan membangun inovasi manajemen pemerintahan daerah dalam penanggulangan kemiskinan, dan bagaimana inovasi manajemen pemerintahan daerah dalam penanggulangan kemiskinan diterapkan. Hasil penelitian tersebut bahwa peluang pertama dalam berinovasi adalah melalui struktur pemerintahan kota yang berbeda dengan kabupaten, dimana walikota memiliki wewenang yang kuat terhadap kelurahan. Peluang ini dimanfaatkan oleh Walikota Pekalongan untuk menyusun strategi inovasi pemerintahan daerah, dengan pelibatan penuh masyarakat kelurahan. Kemampuan walikota dalam menggerakkan lembaga-lembaga yang ada di tingkat kelurahan untuk bersama-sama mengelola program penanggulangan

kemiskinan memberi arti positif. Berbagai faktor pendukung keberhasilan Kota Pekalongan dalam melahirkan dan mengaplikasikan program-program inovatif antara lain adalah kepemimpinan walikota yang kuat dan bervisi, dukungan DPRD, dukungan SKPD, dan partisipasi masyarakat. Semua langkah diikat dengan Peraturan Daerah, sehingga semua pihak terikat untuk melaksanakan program sesuai dengan amanah peraturan daerah sebagai dasar hukum tertinggi di daerah.

Kabupaten Pekalongan belum terlepas dari permasalahan kemiskinan. Pada tahun 2016 tingkat kemiskinan Kabupaten Pekalongan sebesar 12,90% menurun pada tahun 2017, menjadi sebesar 12,61%. Angka ini berada di bawah provinsi namun berada pada posisi di atas rata-rata nasional. Sedangkan target tingkat kemiskinan Kabupaten Pekalongan pada tahun 2019 adalah *single digit* (9,02), 2020 sebesar 8,07% dan tahun 2021 sebesar 7,10%.

Desa/Kelurahan di Kabupaten Pekalongan berjumlah 285, berada di daerah pesisir pantai, pegunungan dan perkotaan. Kemiskinan pada ketiga tipologi tersebut memiliki karakteristik kemiskinan yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Desa pesisir berkarakteristik penghidupan dari sumber laut, perkotaan dari industri

dan jasa serta pegunungan dari hasil pertanian. Berdasarkan BDT 2015 terpetakan menjadi 67 desa merah, 119 kuning dan 99 hijau serta diketahui indikator kemiskinan dan jumlahnya.

Resep penanganan kemiskinan untuk tiap topografi memiliki perbedaan. Atas dasar tersebut dikembangkan Kebijakan Laboratorium Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan yang diinisiasi oleh Bupati Pekalongan Asip Kholbihi. Laboratorium Kemiskinan adalah upaya pemerintah Kabupaten Pekalongan yang bertujuan untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan secara tepat baik program, sasaran, dan manfaat, serta dilakukan secara terpadu, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kemiskinan warga. Upaya ini dilakukan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat desa model, pembangunan serta mengembangkan potensi dan Sumber Daya Alam desa dengan kategori merah, supaya meningkat menjadi desa dengan kategori kuning atau hijau. Tiga desa dipilih sebagai perwakilan topografi masing-masing menjadi desa model pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan.

Dari uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternatif dari permasalahan-permasalahan yang ada pada dalam pelaksanaan kebijakan pengentasan

kemiskinan Laboratorium Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Tylor, 1990 dalam Sugiyono 2013).

Penelitian ini dilakukan Kabupaten Pekalongan. Lokus ini sengaja dipilih karena di Kabupaten Pekalongan terdapat kebijakan pengentasan kemiskinan “Laboratorium Kemiskinan” yang belum ada di daerah lain.

Sumber data untuk penelitian ini berupa, 1) Sumber data primer yakni data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini terutama diperoleh dengan melalui pengamatan dan wawancara sehingga nantinya diperoleh jawaban dari responden maupun informan yang nyata dan sesuai fokus penelitian. 2) Data Sekunder antara lain mencakup dokumen dokumen resmi, buku buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Observasi, Menurut Moleong (2013) Observasi adalah pengamatan dan

pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang di selidiki. Observasi dilakukan secara langsung ke lapangan mengetahui dan mengamati Bagaimana Pelaksanaan Laboratorium Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan 2) Wawancara, proses ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan informan tentang pelaksanaan Laboratorium Kemiskinan 3) Studi Dokumen, Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian

C. HASIL PENELITIAN

Dalam perjalanannya, Laboratorium Kemiskinan menghadapi beberapa masalah atau kendala, yaitu:

- a. Perangkat Daerah terkait belum berperan secara maksimal
Pelaksanaan Laboratorium Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan melibatkan sebagian besar Perangkat daerah di Kabupaten Pekalongan, yaitu:
 - a. BAPPEDA LITBANG (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan) selaku *leading sector* Laboratorium Kemiskinan.
 - b. DINDIKBUD (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)

- c. DPU TARU (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang)
- d. DINPERKIMLH (Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup)
- e. DINKES (Dinas Kesehatan)
- f. DINSOS (Dinas Sosial)
- g. Dinas PMD P3A PPKB (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana)
- h. DINPERINDAGKOP UKM (Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah)
- i. DINLUTKAN (Dinas Kelautan Dan Perikanan)
- j. DINHUB (Dinas Perhubungan)
- k. DKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian).

Dalam implementasi Laboratorium Kemiskinan ini, Perangkat Daerah selaku Unit Pelaksana belum maksimal dalam melaksanakan perannya dalam mendukung tercapainya tujuan kebijakan ini. Ada anggapan ini merupakan pekerjaan atau tugas tambahan di luar pekerjaan rutin mereka.

Permasalahan ini dalam jangka panjang akan menimbulkan dampak yang besar. Jika perangkat daerah selaku unit pelaksana tidak melaksanakan perannya

secara maksimal maka tujuan atau target dari Laboratorium Kemiskinan tidak akan tercapai.

Van Poelje dalam Syafrudin menuliskan bahwa tentang Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah (1976:67) “Bahwa masalah koordinasi adalah salah satu dari pada masalah-masalah pemerintahan yang terpenting, yang lebih-lebih sesudah perang dunia pertama semakin bertambah sukar tetapi pula semakin besar artinya.”

Kenyataan pada implementasi kebijakan, koordinasi menjadi faktor penting bagi ketidakberhasilan pemerintah dalam menjalankan pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan. Dalam lingkup lebih sempit, koordinasi mempunyai pengaruh kuat pada tingkat keberhasilan suatu program pemerintah.

Kendala dalam koordinasi lintas sektoral adalah masih tingginya ego sektoral yang dimiliki instansi-instansi pemerintah. Instansi-instansi ini memiliki kesan gengsi untuk saling bekerjasama, saling meminta bantuan atau saling bertanya atau bertukar informasi tentang program atau kegiatan antar instansi.

b. Pemerintah Desa sampel/model kurang aktif dan responsif.

Laboratorium Kemiskinan mengambil 3 (tiga) desa sebagai model pengentasan kemiskinan. 3 (tiga) model desa tersebut adalah:

1. Desa Mulyorejo, sebagai model kemiskinan desa wilayah pantai/pesisir.
2. Desa Botosari, sebagai model kemiskinan desa wilayah pegunungan.
3. Desa Kertijayan, sebagai model kemiskinan desa wilayah perkotaan

Ketiga desa model ini masih kurang aktif dan responsif dalam pelaksanaan Laboratorium Kemiskinan. Pemerintah Desa masih menganggap Laboratorium Kemiskinan hanya sekedar program biasa seperti program-program yang selama ini mereka laksanakan. Pemerintah Desa belum sepenuhnya memahami urgensi dari Laboratorium Kemiskinan.

Hal ini terlihat dari tingkat partisipasi kehadiran Kepala Desa dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh BAPPEDA LITBANG selaku *leading sector* Laboratorium Kemiskinan. Kepala Desa sering tidak hadir dalam rapat pembahasan Laboratorium Kemiskinan. Mereka seringkali mewakili kehadiran mereka kepada

perangkat desa yang notabene bukanlah pengambilan keputusan.

Rendahnya partisipasi Kepala Desa dalam rapat menyebabkan informasi tentang program Laboratorium Kemiskinan tidak dapat terkomunikasikan dengan baik ke Pemerintah Desa dan masyarakat. Hal ini menyebabkan kurang aktif dan responsif nya desa yang dijadikan model pengentasan kemiskinan melalui Laboratorium Kemiskinan.

Alternatif Kebijakan

a. Membuat Regulasi tentang Pembentukan Tim Pelaksana Laboratorium Kemiskinan

Sampai saat ini belum ada regulasi tentang Pembentukan Tim Pelaksana khusus Kebijakan Laboratorium Kemiskinan. Selama ini tim pelaksana Laboratorium Kemiskinan tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dengan BAPPEDA LITBANG selaku *leading sector*. TKPKD merupakan tim yang bertugas melakukan koordinasi untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Pekalongan secara umum. TKPD terdiri dari perangkat daerah Kabupaten Pekalongan yang terkait dengan usaha-usaha penanggulangan kemiskinan.

Permasalahan Perangkat Daerah pelaksana Laboratorium Kemiskinan yang belum berperan secara maksimal bisa dipecahkan dengan membentuk Surat Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Laboratorium Kemiskinan. Di dalam keputusan ini diatur tentang siapa saja anggota Tim Pelaksana Laboratorium Kemiskinan, tugas dan tanggung jawab anggota tim dari perencanaan, pelaksanaan hingga kewajiban melaporkan hasil kinerja masing-masing anggota tim kepada Bupati Pekalongan melalui BAPPEDA LITBANG selaku *leading sector*.

b. Meningkatkan Koordinasi antar Perangkat Daerah Pelaksana Laboratorium Kemiskinan dan Desa Model

Penyakit dalam birokrasi yang masih saja menjangkiti adalah “ego sektoral”. Syafrudin (1976:70) dalam bukunya menegaskan permasalahan ini dengan tulisannya “Jika sikap pejabat atau petugas yang bersangkutan masabodoh terhadap tugas kewajiban, wewenang serta peranan pejabat atau petugas lain padahal ada sangkut paut dengan tugas dia sendiri, ini akan merupakan persaingan yang negatif. Maka jika itu terjadi, berarti bahwa dalam pembinaan masyarakat ada kesimpang siuran, hambatan-hambatan

antara kegiatan yang sama dengan yang lain, pemborosan waktu, tenaga dan biaya serta lebih jauh akan timbul bentrok-bentrok psikologis antara para pejabat dan masyarakat menjadi segan untuk memilih mana yang sebetulnya harus ditaati perintahnya atau mana yang harus didahulukan jika semuanya harus ditaati. Ini merupakan ciri tidak adanya atau lemahnya koordinasi.”

c. Menyusun Petunjuk Teknis Kebijakan Laboratorium Kemiskinan

Langkah ini harus segera dilakukan, agar semua *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan Laboratorium Kemiskinan bisa memperoleh informasi detail tentang Laboratorium Kemiskinan. Selain itu, para pelaksana Laboratorium Kemiskinan baik Perangkat Daerah maupun Pemerintah Desa model akan lebih memahami apa tugas dan tanggung jawab mereka, juga alur kegiatan dari Laboratorium Kemiskinan.

Ketersediaan Petunjuk Teknis Kebijakan Laboratorium Kemiskinan setidaknya akan memudahkan para pelaksana dan desa model dalam menentukan sasaran-sasaran setiap kegiatan yang tercakup dalam Laboratorium Kemiskinan.

Penilaian Alternatif

a. Membuat Regulasi tentang Pembentukan Tim Pelaksana Laboratorium Kemiskinan

Dengan adanya regulasi berupa Surat Keputusan (SK) Bupati, maka Tim Pelaksana kebijakan ini akan dituntut untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan. Tanpa ada SK, perangkat daerah akan merasa tidak bertanggung jawab atas keberhasilan Laboratorium Kemiskinan.

Alternatif ini sejalan dengan model yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2001;75) tentang syarat implementasi kebijakan. Salah satu syarat tersebut adalah kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam peraturan. Upaya pencapaian tujuan tidak akan membawa hasil yang diharapkan, terkecuali kalau para pejabat dalam badan-badan pelaksana memiliki kesepakatan (komitmen) yang tinggi terhadap upaya pencapaian tujuan tersebut.

b. Meningkatkan Koordinasi antar Perangkat Daerah Pelaksana Laboratorium Kemiskinan dan Desa Model

Alternatif ini akan berjalan jika alternatif pertama telah dilaksanakan. Perangkat Daerah Pelaksana Laboratorium Kemiskinan harus terlebih dahulu diwadahi dalam sebuah regulasi, yaitu SK Bupati. Jika ini sudah terpenuhi, barulah Perangkat Daerah Pelaksana akan bisa melakukan koordinasi dengan Desa Model Laboratorium Kemiskinan.

Koordinasi Perangkat Daerah Pelaksana dengan Desa Model yang terbangun dengan baik, akan memudahkan pencapaian target Laboratorium Kemiskinan. Pada alternatif ini, ego sektoral harus dikesampingkan.

c. Menyusun Petunjuk Teknis Kebijakan Laboratorium Kemiskinan

Alternatif ketiga ini merupakan penunjang bagi kelancaran pelaksanaan Laboratorium Kemiskinan. Petunjuk Teknis ini berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam Laboratorium Kemiskinan.

Dengan Petunjuk Teknis ini, seluruh *stakeholder* akan mempunyai persamaan persepsi dalam mencapai tujuan Laboratorium Kemiskinan. Petunjuk Teknis ini juga dapat dijadikan *guidance* dan evaluasi dalam pelaksanaan Laboratorium Kemiskinan sehingga dapat memaksimalkan upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Laboratorium kemiskinan adalah satu kebijakan baru dalam rangka pengentasan kemiskinan yang memiliki ruang lingkup wilayah kabupaten. Kebaruan (*novelty*) program ini adalah pelibatan semua pihak (*Pentahelix*). Hal ini berbeda dengan program pengentasan kemiskinan yang ada sebelumnya yang cenderung sporadis dan parsial.

Pada program pengentasan kemiskinan sebelumnya belum berdasarkan data valid, sedangkan pada Laboratorium Kemiskinan dilakukan berdasarkan BDT dan diperkuat dengan analisis PPA. Laboratorium kemiskinan juga dilakukan dengan pendekatan topografi wilayah yang di setiap wilayah topografi tersebut memiliki karakteristik, sebab dan solusi kemiskinan yang berbeda.

Dalam implementasinya, Laboratorium Kemiskinan mengalami beberapa permasalahan, yaitu :

1. Perangkat Daerah terkait yang belum berperan secara maksimal.
2. Pemerintah Desa sampel/model yang kurang aktif dan responsif.

Permasalahan ini perlu mendapatkan solusi berupa alternatif kebijakan agar tidak menjadi masalah yang berlarut-larut sehingga akan berdampak pada

keberhasilan kebijakan Laboratorium Kemiskinan.

Dari ketiga alternatif yang diajukan oleh penulis, bisa dibuat perbandingan sebagai berikut:

1. Alternatif pertama, yaitu membuat regulasi tentang Pembentukan Tim Pelaksana Laboratorium Kemiskinan adalah alternatif yang perlu segera dilakukan. Hal ini disebabkan, tanpa tim pelaksana yang terkoordinasi maka kebijakan Laboratorium Kemiskinan tidak akan bisa berjalan.
2. Alternatif kedua, yaitu meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah Pelaksana Laboratorium Kemiskinan dan Desa Model ini akan terlaksana jika alternatif kedua sudah dilaksanakan.
3. Alternatif ketiga, yaitu menyusun Petunjuk Teknis Kebijakan Laboratorium Kemiskinan merupakan alternatif utama dalam mengatasi permasalahan

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik 2020. Profil Kemiskinan di Indonesia <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html> diakses pada 04 April 2021

Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.

Hasibuan, Malayu. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Kemal A. Stamboel. 2012. *Panggilan Keberpihakan: Strategi Mengakhiri Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Kushandajani. *Inovasi Manajemen Pemerintahan Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekalongan*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol 1, No. 1, Maret 2015.

Pattinama, Marcus J. *Pengentasan Kemiskinan dengan Kearifan Lokal (Studi Kasus di Pulau Buru-Maluku dan Surade-Jawa Barat)*. Makara, Sosial Humaniora, Vol. 13, No. 1, Juli 2009: 1-12.

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 97 Tahun 2017 tentang Startegi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pekalongan

Syafrudin, Ateng. 1976. *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*. Bandung: Penerbit Tarsito.

Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Analisis Kebijaksanaan; dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.